



Peningkatan *Financial Literacy* dan Implementasi Sistem Ekonomi Syariah bagi Guru Ekonomi dan Pegawai Lembaga Keuangan Syariah (BMT) di Sokaraja Banyumas

Ida Nurlaeli¹, Sarpini²

^{1,2}UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, Email : idanurlaeli@uinsaizu.com, sarpini@uinsaizu.ac.id

Abstrak

Isu literasi keuangan (*financial literacy*) juga cukup hangat diperbincangkan di Banyumas, di dorong adanya kekhawatiran akibat pertumbuhan penduduk serta perkembangan pesat pasar keuangan. Pemahaman akan *financial literacy* semakin diperlukan demi terciptanya penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, masyarakat tidak hanya dituntut menguasai materi namun juga harus menguasai praktek demi mengikuti perkembangan pasar keuangan. Secara umum kegiatan meliputi tahap Observasi, Persiapan, Pemaparan konsep, Pendampingan dan evaluasi. Dengan bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia cukup menegaskan jika bank dengan sistem operasional syariah memiliki prospek dan peluang yang cukup besar di masa depan untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dan menggantikan sistem ekonomi konvensional yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Islam, pendapatan keuntungan melalui praktik riba ditiadakan, dan sebagai gantinya, bank akan mengambil keuntungan menggunakan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*). Kelebihan kedua yang dimiliki oleh bank syariah adalah lebih menitikberatkan pada investasi di sektor riil. Bagi Indonesia, pasar riil jauh lebih penting karena menyangkut denyut ekonomi sebagian besar masyarakat. Literasi keuangan sangatlah penting dimiliki setiap orang karena akan mempengaruhi perilaku keuangan dari individu tersebut

Kata-kata kunci : *Financial Literacy*; Sistem Ekonomi Syariah; Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

With the emergence of Islamic Financial Institutions (LKS) in Indonesia, it is enough to emphasize that banks with an operational Islamic system have considerable prospects and opportunities in the future to become the main choice for Indonesian people and replace the conventional economic system that was previously implemented in Indonesia. In the concept of Islamic economics, profit income through the practice of usury is abolished, and instead, banks will take advantage of using a profit-loss sharing system. This profit-sharing system is felt to be safer because it does not affect the impact of fluctuations in the rupiah exchange rate or the standard rate of interest set by the government as felt by other interest-based banks. The second advantage possessed by Islamic banks is that they focus more on investment in the real sector. For Indonesia, the real market is far more important because it involves the economic pulse of most people. That is, the real sector is more in favor of the lower classes of society. The real sector is a sector that has a significant impact on the financial sector. if the real score declines, then automatically the financial sector will also experience a decline. Financial literacy is very important for everyone because it will affect the financial behavior of the individual

Keywords : Financial Literacy; Sharia Economic System; Sharia Financial Institution

Pendahuluan

Ilmu *Ekonomi Islam* menjadi landasan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syaria'ah, baik lembaga perbankan maupun nonperbankan. Perkembangan lembaga keuangan syaria'ah diawali dengan lahirnya Bank Muamalat di Jakarta sebagai Bank Syaria'ah pertama di Indonesia tahun 1992, didukung UU (Undang-undang) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syaria'ah. Kini jumlah Bank Umum Syaria'ah berlipat ganda, baik bank-bank Syaria'ah baru maupun bank-bank nasional konvensional dengan dual-sistem (Amin, A Riawan: 2011:11). Perkembangan perbankan syaria'ah tersebut dapat dilihat dari pendistribusiannya, yang relative sudah tersebar di seluruh Indonesia. Konsep perbankan yang mulanya hanya merupakan diskusi teoritis, kini telah menjadi realitas faktual yang tumbuh dan berkembang.

Jumlah perbankan syaria'ah di Indonesia hingga November 2014, jumlah industri Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank, BPRS sebanyak 163 bank, dan jaringan kantor sebanyak 2.939. Sementara, jumlah nasabah bank syariah saat ini kira-kira 10 juta orang, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Adapun total aset (khusus BUS dan UUS) sebesar Rp 261,927 triliun, pembiayaan sebesar Rp198,376 triliun, dan penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah sebesar Rp 209,644 triliun. Aset pertumbuhan Perbankan Syaria'ah nasional mencapai 17,96%, market share 5%. *Market share* lembaga keuangan syaria'ah BPRS di Banyumas menunjukkan perkembangan yang lebih bagus. Dana Pihak Ketiga (*Funding*) dan *Lending* (pembiayaan/kredit) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syaria'ah di Banyumas:

Tahun	Bank Umum Konvensional		Bank Umum Syaria'ah	
	Funding	Lending	Funding	Lending
	%	%	%	%
2012	97.44	95.87	2.56	4.13
2013	96.66	93.37	3.34	6.63
2014	95.75	93.68	4.25	6.32
2015	95.31	93.72	4.69	6.28
2016	90.14	94.28	5.21	5.72

Data Bank Indonesia (BI) Cabang Purwokerto

Dana Pihak Ketiga (*Funding*) dan *Lending* (pembiayaan/kredit) BPR dan BPRS di Banyumas:

Tahun	BPR		BPRS	
	Funding	Lending	Funding	Lending
	%	%	%	%
2013	92.77	92.14	7.23	7.86
2014	91.62	91.28	8.38	8.72

2015	90.53	90.71	9.48	9.29
2016	90.14	90.03	9.86	9.97

Data OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Cabang Purwokerto

Dari data di atas *market share* Perbankan syariah di Banyumas baik *funding* (5.21%) maupun pembiayaan (5.72%) menunjukkan hasil prosentase yang lebih besar daripada *market share* perbankan syariah secara nasional (5%), demikian juga *market share* BPRS. Bahkan *market share* BPRS menunjukkan prosentase yang lebih besar daripada *market share* Bank Umum Syariah baik *funding* nya yang mencapai 9.86% maupun pembiayaannya yang mencapai 9.97%.

Berdasarkan penelitian Mintaraga dan Ida nurlaeli, persepsi masyarakat Banyumas terhadap produk-produk lembaga keuangan syariah, terbagi menjadi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni; 30% *lawfull*, artinya meyakini produk-produk lembaga keuangan syariah sudah syariah, 20% *unlawfull* artinya meyakini produk-produk lembaga keuangan syariah tidak syariah dan 50% *doubthfull* artinya meyakini produk-produk lembaga keuangan syariah baru setengah syariah. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat warga Banyumas didominasi oleh penduduk beragama Islam dan agama Islam di Banyumas memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan kebudayaan di daerah itu.

Isu literasi keuangan (*financial literacy*) juga cukup hangat diperbincangkan di Banyumas, di dorong adanya kekhawatiran akibat pertumbuhan penduduk serta perkembangan pesat pasar keuangan. Pemahaman akan *financial literacy* semakin diperlukan demi terciptanya penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik, masyarakat tidak hanya dituntut menguasai materi namun juga harus menguasai praktek demi mengikuti perkembangan pasar keuangan. Hal ini dimaksudkan agar pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan tidak salah. Byrne dan Alistair (2007) mengatakan bahwa rendahnya literasi keuangan akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah dan pencapaian kesejahteraan di usia yang tidak produktif lagi.

Pembicaraan tentang *financial literacy*, berkaitan erat dengan kegiatan menabung dan pemilihan tempat berinvestasi. Lembaga keuangan syariah sebagai lembaga keuangan yang lolos dari terjangan krisis moneter 1998 harus senantiasa menunjukkan ketangguhannya sebagai sistem yang bebas riba dan senantiasa membawa kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan latar belakang dan isu tersebut maka fokus pengabdian ini adalah untuk meningkatkan edukasi literasi keuangan bagi masyarakat dan implementasi sistem ekonomi syariah bagi para pegawai lembaga keuangan syariah di Banyumas.

Metode

Ada beberapa strategi yang dipergunakan atau solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para mitra yakni guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah. Metode pendekatan pada program yang akan dilaksanakan ini adalah: pertama, penanaman motivasi pentingnya memahami *financial literacy* khususnya bagi para guru ekonomi dan penguasaan implementasi

sistem ekonomi syariah bagi para pegawai lembaga keuangan syariah. Kedua, mengadakan diskusi pendahuluan untuk mengecek kegiatan penyampaian materi *financial literacy* yang selama ini sudah dijalankan dan mengecek implementasi sistem ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Ketiga, memfasilitasi modul *financial literacy* dan modul implementasi ekonomi syariah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu : pertama, koordinasi persiapan pelatihan *financial literacy* dan implementasi sistem ekonomi syariah. Kedua, pelaksanaan pelatihan motivasi pentingnya memahami *financial literacy* bagi guru ekonomi dan implementasi sistem ekonomi syariah bagi pegawai lembaga keuangan syariah. Ketiga, persiapan pelatihan *financial literacy* dan implementasi sistem ekonomi syariah. Keempat, pelaksanaan pelatihan *financial literacy* dan implementasi sistem ekonomi syariah. Kelima, praktek menyampaikan materi *financial literacy* pada siswa masing-masing bagi guru ekonomi dan praktek implementasi sistem ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah bagi pegawai lembaga keuangan syariah. Keenam, melakukan kunjungan-kunjungan kepada beberapa sekolah dan lembaga keuangan syariah dan mengadakan pendampingan serta evaluasi.

Secara umum kegiatan meliputi tahap observasi, persiapan, pemaparan konsep, dan pendampingan dan evaluasi. Tahap observasi merupakan kegiatan identifikasi atau analisis terhadap *existing* kompetensi guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah. Data hasil observasi selanjutnya menjadi dasar dalam ruang lingkup, keluasan dan kedalaman dalam hal penyiapan materi, perangkat dan sarana prasarana pendampingan. Tahap persiapan merupakan kegiatan penyiapan bahan pelatihan, menyiapkan modul pelatihan, tempat serta sarana prasarana. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan observasi. Tahap pemaparan konsep dilakukan untuk membekali peserta dengan pengetahuan dasar tentang *financial literacy* dan implementasi sistem ekonomi syariah melalui penerapan aplikasi produk-produk di lembaga keuangan syariah. Selanjutnya tahap pendampingan dan evaluasi merupakan kegiatan mengamati praktek yang dilakukan oleh peserta pelatihan di tempat masing-masing dengan cara melakukan kunjungan-kunjungan.

Hasil dan Pembahasan

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini di dunia berkembang banyak konsep tentang sistem ekonomi yang bisa diterapkan. Tiap negara dapat memilih mana sistem ekonomi yang tepat sesuai kondisi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan suatu sistem pengaturan ekonomi tersedia, terarah serta terpadu yang kemudian dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat (Zakaria, 2012). Studi tentang ekonomi syariah sudah cukup lama. Sebagian besar isu tentang ekonomi syariah tersimpan dalam literatur Islam seperti Al-Quran dan Hadits, ekonomi syariah (*Islamic*

economic) baik sebagai disiplin ilmu sosial maupun sebuah sistem. Kehadirannya sistem ekonomi juga tidak disebabkan dari sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Islam datang dari tuntutan Islam itu sendiri (Aziz et al., 2022). Sistem Islam tampil menjadi pesaing kapitalis setelah kejatuhan sosialis dalam ekonomi global. Ekonomi sistem Islam memusatkan porosnya pada Tuhan. Sedangkan ekonomi sistem kapital berpusat pada kekuatan finansial. Adapun ekonomi sosialis mendasarkan pada rakyat secara komunal. Terciptalah percaturan politik dalam memperebutkan sistem ideal untuk memimpin ekonomi global (Darmalaksana, 2018).

Ketidakpuasan masyarakat dengan adanya sistem ekonomi kapitalis, lahirlah ekonomi sosialis dengan prinsip setiap masyarakat memiliki hak yang sama atas faktor faktor produksi. Faktor produksi yang meliputi pengusaha, pekerja, modal, sumber daya alam dimiliki bersama oleh masyarakat dan diatur oleh negara. Peran pemerintah (negara) sangat kuat dan besar. Di satu sisi memang menumbuhkan sikap kebersamaan, ada istilah dalam bahas jawa “mangan ora mangan sing penting ngumpul”. Prinsip yang dikedepankan adalah kebersamaan dan persamaan, sehingga tidak ada motivasi untuk berusaha, karena sebesar apapun mereka berusaha pada akhirnya hak yang diterima sama dengan mereka yang tidak melakukan apapun. Inilah yang menyebabkan sistem ekonomi sosialis runtuh dengan tumbangunya uni soviet pada 26 Desember 1991 (Hilyatin, 2021).

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis, mengalami krisis berkepanjangan yang sampai saat ini belum bisa dipastikan apakah Indonesia telah keluar dari krisis. Krisis moneter yang dialami Indonesia sedemikian parah. Pada bulan Juli 1997 rupiah terdevaluasi hingga 30% dan pada Juli 1998 (dalam setahun) rupiah sudah terdevaluasi hingga 90%. Sehingga hal ini tidak hanya menimbulkan kekacauan di bidang moneter tetapi juga banyak bidang usaha yang gulung tikar. Beberapa bank di Tanah Air tumbang akibat krisis moneter. Ketika itu, pemerintah terpaksa harus mengalirkan dana ratusan triliun dalam bentuk obligasi rekapitulasi ke hampir semua bank besar. Tetapi, masih ada bank, yang walaupun sedikit terguncang, berhasil selamat dari krisis. Bahkan, tanpa bantuan uang negara sedikitpun. Salah satunya, yaitu Bank Muamalat Indonesia Tbk. Bank murni syariah pertama di Indonesia itu selamat dari krisis bukan tanpa sebab. Bank Muamalat dinilai lebih tahan guncangan karena sistem syariah yang dianut mengharamkan perusahaan dari aksi spekulasi, yang digadang-gadang sebagai penyebab krisis keuangan (Hadi, 2018). Dari sinilah sistem Ekonomi Islam yang lebih dikenal dengan ekonomi syariah mulai berkembang di Indonesia. Peranan strategis ekonomi syariah yang ditandai dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah sebenarnya sangat ditentukan oleh strategi pembangunan nasional Indonesia.

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi berasal dari bahasa latin *oikos nomos* yang diperkenalkan oleh ahli filasat Aristoteles pada zaman Yunani Kuno. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti “ilmu”. Ilmu ekonomi adalah kajian tentang produksi,

distribusi dan konsumsi yang dilakukan oleh individu yang tinggal dalam satu keluarga (rumah tangga) (Syahbudi, 2018).

Ekonomi Syariah menurut ash-Shidiqy adalah respons pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha kreasi ini dibantu oleh al-Quran dan as-Sunnah, akal (*ijtihad*) dan pengalaman (Zakaria, 2012). Ekonomi Islam atau ekonomi syariah memiliki cakupan yang cukup luas pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salahsatu kajian dalam ekonomi Islam ini dikenal dengan muamalah atau pergaulan antarsesama yang mengajarkan tentang bagaimana kejujuran, keadilan, melakukan segala sesuatu tugas dengan amanah kasih sayang, silaturahmi dan juga ihsan.

Kajian lain dalam ekonomi Islam yakni mengenai etika yang memiliki pokok bahasan antara lain mengenai politik, ekonomi, ilmu dan juga mengenai peperangan. Etika dan norma merupakan salahsatu pokok bahasan yang paling penting dan tidak dapat terpisahkan dari ajaran ekonomi Islam. Selain norma agama dan norma ketuhanan juga terdapat norma kemanusiaan dalam ekonomi Islam. Jika norma agama dan norma ketuhanan mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan agama dan tuhan nya dengan segala perintah dan larangan selama hidup di dunia dan juga bagaimana ganjaran yang akan diterima manusia kelak jika sudah berada di akhirat (Era & Marsudi, 2022).

2. Prinsip dan nilai-nilai ekonomi Syariah

Prinsip dasar ekonomi syariah memastikan aktivitas transaksi keuangan didasarkan pada aset atau proyek riil, sehingga ekonomi syariah berperan penting dalam mendukung perbaikan struktur ekonomi, pengembangan sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Maju yang dicapai melalui transformasi ekonomi untuk memperkuat struktur perekonomian (BI) (BI, 2019).

Nilai-nilai ekonomi syariah bukanlah suatu konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk umat Muslim, namun merupakan konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai ekonomi syariah ini menjunjung tinggi keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah (Aziz et al., 2022). Nilai-nilai ekonomi syariah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa prinsip dasar yang diperkuat dengan berbagai perangkat instrumen. Implementasi instrumen tersebut akan mencegah penimbunan sumber daya sehingga dapat terus mengalir mendukung investasi produktif dalam rangka menggerakkan roda perekonomian secara berkesinambungan (Kosanke, 2019).

Nilai-Nilai Ekonomi Syariah yang pertama adalah kepemilikan. Pada hakikatnya segala sesuatu milik Allah secara absolut. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah, yang diberi amanat dan kepercayaan untuk

mengelolanya, dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah. Islam menghormati hak relative kepemilikan pribadi atas harta sekaligus menjaga keseimbangan antara hak relative pribadi, kolektif dan negara.

Yang kedua yaitu berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara pada penimbunan harta berlebihan. Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk menumpuk harta harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendorong berkembangnya perniagaan dan partisipasi sosial. Partisipasi sosial dilakukan dengan menafkahkan sebagian harta untuk kepentingan bersama melalui infak, sedekah, dan wakaf.

Yang ketiga kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif yaitu kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan.

Yang keempat pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyakbanyaknya kepada alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*) Untuk mencapai tujuan itu pertumbuhan ekonomi menjadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Sedangkan Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

- a. Pengendalian harta. Kepemilikan relatif manusia atas harta harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu, untuk diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik*) yang telah ditentukan. Prinsip ini merupakan penjelasan fungsi zakat dalam mendorong harta yang tertumpuk untuk keluar dan mengalir ke dalam aktivitas perekonomian.
- b. Distribusi kekayaan dan pendapatan. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan dasarnya.
- c. Optimalisasi bisnis dan berbagi risiko. Riba yang merupakan tambahan yang dipastikan atau ditetapkan dimuka (*ex- ante*) secara pasti atas utilitas sejumlah dana. Tambahan yang dipastikan tersebut akan mematikan semua potensi aktivitas ekonomi yang berada di bawah tingkat riba. Semakin tinggi tingkat riba, semakin banyak potensi bisnis yang mati dan sebaliknya. Prinsip ini lebih mendorong aktivitas bisnis (investasi dan jual beli) secara optimal. Riba akan memberikan dampak pengalihan risiko (*risk transfer*) dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Pelarangan riba akan mendorong aktivitas bisnis dengan berbagi risiko.
- d. Berinvestasi secara produktif. *Maysir* atau perjudian adalah suatu kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan produktif di sektor riil dengan

ketidakpastian tinggi (spekulasi). Tidak adanya keterkaitan dengan sektor riil ini menjadikan maysir diharamkan oleh Allah, karena tidak memberikan manfaat kepada perekonomian. Prinsip ini mendorong kegiatan investasi yang terkait sektor riil sehingga dapat menciptakan produktifitas.

- e. Partisipasi sosial untuk kepentingan public. Prinsip ini mendorong partisipasi sosial masyarakat untuk kepentingan publik. Hal ini dilakukan melalui mekanisme infak, sedekah, dan wakaf (ISWAF). Penggalan dana ISWAF akan menambah sumber daya publik untuk mendorong kegiatan perekonomian guna kemanfaatan bersama.
 - f. Bertransaksi atas dasar kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Prinsip transaksi dalam ekonomi syariah memuat aturan-aturan yang bila dipenuhi akan memberikan jaminan keseimbangan dan efektivitas implementasi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah.
3. Pengertian literasi keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu terkait ekonomi dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk mengelola keuangan yang dimiliki. *Financial literacy* atau literasi keuangan yang baik adalah yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, sebagai muslim ketika membicarakan tentang *investasi* tidak terlepas dari *financial literacy* yang membawa kemaslahatan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat dan berdasar keimanan atau keyakinan tiap individu tersebut.

Peningkatan pemahaman *financial literacy* harus dimulai sejak usia dini. Sejak dibangku sekolah siswa harus dibekali dengan cara-cara pengelolaan keuangan yang baik, disini faktor pengajar sangat berpengaruh. Guru ekonomi sebagai fasilitator pengetahuan tentang ekonomi harus didukung oleh kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan kompetensi sosial yang memadai. Maka guru ekonomi dipandang sebagai salah satu subyek dampingan yang sangat tepat dalam kegiatan pengabdian ini yakni sebagai sumber ilmu yang dapat mentransfer kepada para siswanya tentang *financial literacy* yang baik.

Penduduk yang mayoritas beragama Islam, merupakan aset yang besar dan bagus bagi perkembangan lembaga keuangan syariah, apabila pihak lembaga keuangan syariah dapat mengelola faktor tersebut dengan baik. Berdasar penelitian tim BI (Bank Indonesia) perkembangan lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu; sikap masyarakat, SDM (sumber daya manusia) yang bekerja di lembaga keuangan syariah dan aplikasi produk-produk yang dijalankan. Sikap masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sendiri sangat dipengaruhi oleh diantaranya latar belakang pendidikan dan kemampuan/keluasan pengetahuan SDM (sumber daya manusia)/pegawai tentang produk-produk yang syar'i. Maka SDM (sumber daya manusia)/pegawai yang bekerja di lembaga keuangan syariah dipandang sebagai subyek dampingan yang sangat tepat yakni

sebagai tenaga yang aktif mensosialisasikan dan mengimplementasikan sistem ekonomi syariah kepada masyarakat/nasabah.

4. Data literasi keuangan Indonesia

Pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh OJK. Berdasarkan data survei yang dipublikasikan oleh OJK tersebut, maka bisa dilihat bahwa literasi keuangan di 34 provinsi di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Secara nasional, kemampuan literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 38,03%. Kemampuan literasi keuangan tertinggi sendiri diperoleh oleh masyarakat di provinsi DKI Jakarta dengan nilai 59,16%. Disusul oleh wilayah DI Yogyakarta dengan 58,53%. Sedangkan, di urutan ketiga adalah Jawa Timur dengan 48,95%.

Literasi keuangan sangatlah penting dimiliki setiap orang karena akan mempengaruhi perilaku keuangan dari individu tersebut. Menurut Cole et al (2009), literasi keuangan dan perilaku keuangan sangat erat kaitannya, yang mana mereka menemukan bahwa literasi keuangan bisa memprediksi permintaan layanan keuangan. Penelitian yang termuat dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Kebijakan Fiskal juga mengungkapkan bahwa individu yang mengetahui tempat peminjaman resmi diestimasi akan memiliki peluang 2,88% lebih tinggi untuk sejahtera dibandingkan orang yang tidak mengetahuinya. Variabel lainnya adalah orang dengan literasi tinggi cenderung akan mempunyai akun tabungan dan diestimasikan memiliki peluang 5,36% lebih tinggi untuk sejahtera dibandingkan yang tidak memilikinya.

5. Kondisi subyek dampingan saat ini

Mengacu pada hasil observasi dan wawancara sederhana dengan para guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah pada observasi penelitian-penelitian yang sudah pernah penulis lakukan, pembahasan tentang ekonomi syariah bukan tema yang asing lagi. Bahkan di sekolah-sekolah umum pembelajaran untuk mata pelajaran ekonomi selalu dikaitkan dengan ekonomi syariah. Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di Banyumas dan maraknya seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah.

Subyek dampingan terdiri dari 30 orang, 20 orang adalah guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) dan 10 orang adalah pegawai utusan dari lembaga keuangan syariah dalam hal ini BTM Sokaraja. Pemahaman tentang *financial literacy* sudah tersampaikan, hanya yang kaitannya dengan keberagaman/keimanan dan ekonomi syariah sebagai satu paket belum tersampaikan dalam pembahasan mata pelajaran ekonomi, hal itu karena keterbatasan kemampuan guru ekonomi baik yang berkaitan dengan *financial literacy* berbasis agama maupun tentang ekonomi Islam. Padahal menurut Glock agama harus mempunyai fungsi dalam kehidupan nyata.

Di lembaga keuangan syariah sendiri untuk SDM (sumber daya manusia) yang memiliki kemampuan ekonomi syariah baik atau yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi syariah hanya 20%. Sehingga sangat dimungkinkan pengetahuan dan wawasan tentang sistem ekonomi syariah yang

syar'i sangat minim dan masih sangat membutuhkan pelatihan-pelatihan yang bersifat mensosialisasikan tentang sistem aplikasi produk-produk lembaga keuangan syariah yang syar'i.

6. Kondisi Subyek Dampungan yang Diharapkan

Setelah mengikuti program ini, para guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah di Sokaraja diharapkan akan memiliki kemampuan yang lebih tentang *financial literacy* dan implementasi sistem ekonomi syariah, secara rinci bagi guru ekonomi diharapkan sebagai berikut :

- a. Memiliki wawasan yang luas mengenai *financial literacy*, terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan membawa kemaslahatan dunia dan akhirat, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk ummat
- b. Tumbuh keinginan memotivasi dan mengarahkan para siswa untuk memahami
 - i. *financial literacy* dan mempraktekannya
- c. Mampu dan terampil mensosialisasikan *financial literacy* yang membawa kemaslahatan

Bagi pegawai lembaga keuangan syariah, secara rinci diharapkan:

- a. Memiliki pemahaman secara detail mengenai akad dan aplikasi produk-produk lembaga keuangan syariah: mudharabah, murabahah, ijarah, wadiah, hiwalah, qard hasan, dll. Terutama pegawai lembaga keuangan syariah dengan latar belakang pendidikan bukan sarjana syariah.
- b. Memiliki pemahaman secara detail tentang fatwa-fatwa DSN (dewan syariah nasional) untuk tiap-tiap produk lembaga keuangan syariah.
- c. Mampu mensosialisasikan sistem aplikasi produk-produk lembaga keuangan syariah yang syar'i kepada nasabah dan masyarakat
- d. Mampu memenuhi tuntutan inovasi produk-produk baru yang syar'i, sesuai kebutuhan masyarakat/nasabah dan bebas riba
- e. Secara umum lembaga keuangan syariah tetap mengutamakan pemutaran modal untuk usaha riil daripada konsumtif.

Simpulan

Bermunculannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia cukup menegaskan jika bank dengan sistem operasional syariah memiliki prospek dan peluang yang cukup besar di masa depan untuk menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dan menggantikan sistem ekonomi konvensional yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Dalam konsep ekonomi Islam, pendapatan keuntungan melalui praktik riba ditiadakan, dan sebagai gantinya, bank akan mengambil keuntungan menggunakan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*). Sistem bagi hasil ini dirasa lebih aman karena tidak berpengaruh terhadap dampak fluktuasi nilai tukar rupiah ataupun oleh nilai standar bunga yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana yang dirasakan oleh bank-bank lain yang berbasis

bunga (*interest*).

Kelebihan kedua yang dimiliki oleh bank syariah adalah lebih menitikberatkan pada investasi di sektor riil. Bagi Indonesia, pasar riil jauh lebih penting karena menyangkut denyut ekonomi sebagian besar masyarakat. Artinya, sektor riil lebih memihak kepada kalangan masyarakat kelas bawah. Sektor riil merupakan sektor yang memiliki dampak signifikan pada sektor finansial. apabila sektor riil mengalami penurunan, maka otomatis sektor finansial pun akan mengalami penurunan. Literasi keuangan sangatlah penting dimiliki setiap orang karena akan mempengaruhi perilaku keuangan dari individu tersebut.

Daftar Rujukan

- Aziz, J. A., Widiyanto, H., & Aziz, J. A. (2022). *Raharjo Tentang Masa Depan Ekonomi Islam DI. 8(2)*, 490–504. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.269>
- BI. (2019). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2019*. 179. fiskal.kemenkeu.go.id
- Darmalaksana, W. (2018). Asas Konkordansi Islam Dan Pancasila Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 13(1), 195–229. https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.195_229
- Ekonomi, P., Melalui, K., Pengelolaan, P., Suyanti, K., Astriawati, N., Wibowo, W., Widyanto, H., Manajemen, P., Laut, T., Tinggi, S., Yogyakarta, M., Prodi,), & Kapal, P. (2022). Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pelatihan Pengelolaan Koperasi. *Dedication: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 87–94. <http://www.jurnal.ikipjember.ac.id/index.php/dedication/article/view/661>
- Era, K., & Marsudi, R. (2022). Harmonisasi Ekonomi Islam Dan Ekonomi Pancasila. *El - W a s a t h i y A*, 10(01), 43–67.
- Hadi, N. (2018). Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 97. <https://doi.org/10.24014/af.v17i1.4769>
- Hilyatin, S. R. dan D. L. (2021). *Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan*. 6(1).
- Lutfillah, N. Q. (2020). Koperasi sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan Indonesia. *Oetoesan Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 2(2), 90–98. <https://doi.org/10.34199/oh.2.2.2020.008>
- Masri, A. R. (2018). *Strategi Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Sosial Ekonomi Kerakyatan)*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/beritasosial/article/view/9917>
- Misbah, A. (2021). Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 1–15. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/>
- Muheramtohad, S. (2018). Ekonomi Kerakyatan Versus Ekonomi Liberal Dalam Pandangan Fiqh Muamalah. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 6(1), 68. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i1.3698>

- Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat Dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. *Iqtishoduna*, 8(2), 273-292.
- Zakaria, B. (2012). Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera. ... : *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1-11.